

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Audit

Pengertian audit Menurut Alvin A. Arrens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014:4) yang dimaksud dengan audit adalah:

*“Auditing is accumulated and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person”.*

Soekrisno Agoes (2012:4), Mendefinisikan audit sebagai berikut:

*“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”*

Menurut Mulyadi (2010: 19) pengertian auditing adalah sebagai berikut:

*“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”*

Dari beberapa definisi audit diatas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu aktivitas yang sistematis untuk mengevaluasi dan melaporkan hasil bukti pemeriksaan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan pemeriksaan harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi serta independen untuk dikomunikasikan kepada para pengguna para pengguna laporan keuangan.

### 2.1.1.1 Standar Audit

Standar audit berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja auditor independen dan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Standar auditing digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011 150.1-105.2) adalah sebagai berikut: A. Standar umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

#### B. Standar Pekerjaan Lapangan.

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

#### C. Standar Pelaporan.

1. Laporan Audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan Auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

### 2.1.1.2 Jenis – jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012) jenis-jenis audit adalah sebagai berikut :

1. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
  - a. Pemeriksaan Umum Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
  - b. Pemeriksaan Khusus Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
  - a. Manajemen Audit Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
  - b. Pemeriksaan ketaatan Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam-LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).
  - c. Pemeriksaan *Intern*, Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
  - d. Computer Audit Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.

Sedangkan menurut Elder, Beasley dan Arens, yang dialih bahasakan oleh Jusuf (2012:6) jenis-jenis audit adalah sebagai berikut :

Audit Laporan Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh data mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan

secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

1. Audit Operasional (*Operational Audit*) Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap kegiatan dari prosedur dan metode organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.
2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak diaudit telah mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa dari berbagai jenis audit yang dilakuan kecuali laporan audit keuangan, keseluruhan audit memiliki

tujuan yang hampir sama yaitu menilai bagaimana manajemen mengoperasikan perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki, meningkatkan efisiensi proses dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

### **2.1.1.3 Pengertian Auditor**

Pengertian auditor menurut Abdul Halim (2008:18) adalah :

“Seseorang yang independen dan kompeten yang menyatakan pendapat atau pertimbangan mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan terhadap asersi atau entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan.”

Sedangkan menurut Mulyadi (2009:130) mendefinisikan auditor adalah:

“Auditor adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang di buat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama di tujukan untuk memenuhi kebutuhan para kreditur, calon kreditur, investor, calon investor dan instansi pemerintah.”

Berdasarkan pengertian di atas auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditor adalah pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

#### 2.1.1.4 Jenis – jenis Auditor

Jenis-jenis Auditor Menurut Arens et.al (2011:19), sebagai berikut :

1. Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil.
2. Auditor Internal Pemerintah Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melayani kebutuhan pemerintah.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan badan yang didirikan berdasarkan Konstitusi Indonesia.
4. Auditor Pajak Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak salah satu utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk memberlakukan apakah SPT itu adalah untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.
5. Auditor Internal Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR.

Sedangkan menurut Mulyadi (2003:29) jenis-jenis auditor adalah sebagai berikut : “Orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:

##### 1. Auditor Independen

Audit independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintahan (terutama instansi pajak). Pihak yang

memanfaatkan jasa auditor independen terutama adalah pihak selain kliennya. Oleh karena itu, independensi auditor dalam melaksanakan keahlian merupakan hal yang pokok, meskipun auditor tersebut dibayarkan klien karena jasa yang diberikan tersebut. Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya.

## 2. Auditor Pemerintah

Auditor Pemerintah adalah audit professional yang bekerja di instansi pemerintah yang bekerja di instansi pemerintahan yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan pada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak.

## 3. Auditor intern

Auditor intern adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemakai jasa auditor adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, audit intern harus berada di luar fungsi lini suatu organisasi, tetapi tidak lepas dari hubungan bawahan atasan seperti hubungan lainnya. Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Kebutuhan akan adanya audit internal di dalam suatu perusahaan semakin meningkat sejalan dengan meningkat operasi perusahaan. Pentingnya audit internal sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan bertambah kompleknya sistem akuntansi.

Dengan semakin besarnya organisasi perusahaan, untuk itu diperlunya pendelegasian wewenang karena tidak mungkin semua wewenang dan berbagai departemen, bagian seksi, ataupun satuan organisasi lainnya berada dan dipegang oleh satu orang. mengingat akan hal tersebut, maka diperlukan adanya bagian yang disebut dengan audit internal.

## 2.1.2 *Fee Audit*

### 2.1.2.1 Pengertian *Fee Audit*

Menurut Sukrisno Agoes (2012:18) Audit Fee adalah sebagai berikut:

“Besaran biaya yang tergantung antara lain pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.”

Menurut Iskak dalam Fisca dan Wahyu (2018) *fee audit* diartikan sebagai berikut :

“*Audit Fee* adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan biaya perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung.”

Menurut Primasari dan Sudarno(2013) dalam Fisca dan Wahyu (2018) :

“*Fee Audit* adalah imbalan yang diterima auditor atas jasa audit yang diberikan.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Fee audit* adalah besaran biaya atau imbalan atas jasa yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan biaya perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung, resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.

### 2.1.2.2 Penetapan Standar *Fee Audit*

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 (IAPI, 2016) menyatakan bahwa imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau diajukan oleh auditor atau akuntan lain akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar professional yang berlaku.

Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia PP No.2/IAPI/III/2016 mengenai panduan penetapan imbal jasa (*fee*) audit adalah sebagai berikut :

Prinsip dasar penetapan imbal jasa audit:

- 1) Dalam menetapkan imbal jasa audit, Anggota harus mempertimbangkan :
  - a. Kebutuhan klien dan ruang lingkup perkejaan.
  - b. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit.
  - c. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*).
  - d. Tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan.
  - e. Tingkat kompleksitas pekerjaan.
  - f. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan.

- g. Sistem Pengendalian Mutu Kantor.
  - h. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.
- 2) Penetapan Tarif Imbalan Jasa.
- a. Tarif imbal jasa (*charge-out rate*) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing.
  - b. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan:
    - Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian.
    - Imbalan lain diluar gaji.
    - Beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, serta riset dan pengembangan.
    - Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (*project chargeout time*) untuk staf profesional dan staf pendukung.
    - Marjin laba yang pantas
  - c. Tarif imbal jasa per-jam (*hourly charge-out rates*) yang ditetapkan berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk setiap staf atau untuk setiap kelompok staf (junior, senior, supervisor, manajer) dan partner.
- 3) Pencatatan Waktu

Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan time sheet yang sesuai perlu dilakukan secara teratur untuk dapat menghitung imbalan jasa secara akurat dan realistis, dan untuk dapat menjaga efisiensi dan

efektifitas pekerjaan *Time sheet* sekaligus berfungsi sebagai kartu kendali staf dan dasar dari pengukuran kinerja.

#### 4) Penagihan Bertahap

Praktik yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan.

Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu.

### 2.1.2.3 Komisi dan *Fee Referral*

Menurut Sukrisno Agoes (2012:54) ada beberapa *Fee* di luar *Fee* utama diterima seorang auditor asalkan *Fee* tersebut tidak mengurangi independensi auditor, di antaranya yaitu:

- a. Komisi Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain.
- b. *Fee referral* adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.

Sedangkan Mulyadi (2008:65) membedakan antara komisi dan *fee referral* sebagai berikut :

- a. Komisi  
Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.
- b. *Fee Referral (rujukan)*  
*Fee referral* adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.*Fee Referral (rujukan)* hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa selain biaya audit terdapat juga biaya lainnya. Berdasarkan biaya lainnya yang telah dikemukakan di atas, maka seorang auditor bisa mendapatkan biaya lain di luar biaya utama. Dengan adanya biaya lain ini maka diharapkan sikap independensi dari seorang auditor terjaga, sehingga klien atau pihak lain yang berkepentingan percaya kepada KAP dan auditor tersebut.

#### **2.1.2.4 Faktor Penentu *fee* Audit**

Terdapat beberapa Faktor dalam menentukan besarnya biaya audit. Menurut Abdul Halim (2008:107) ada tiga faktor dominan yang menentukan besarnya Audit *Fee*, yaitu sebagai berikut :

1. Karakteristik Keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dan lain-lain.
2. Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lainlain.
3. Kegiatan Eksternal Auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor dan lain-lain.

Selain itu terdapat juga indikator dari *fee* audit yang dapat di ukur dari:

1. Besaran *fee* bergantung pada resiko penugasan Sebagai sebuah profesi yang beresiko terhadap pertanggung jawaban kerjanya maka resiko penugasan menjadi pertimbangan besar kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang diberikan.
2. Besaran *fee* bergantung Kompleksitas jasa yang diberikan Semakin sulit tugas audit yang diberikan, maka akan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh sebuah audit.

3. Besaran *fee* bergantung pada Tingkat keahlian Tingkat keahlian yang yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut.
4. Besaran *fee* bergantung pada struktur biaya KAP Sebagai sebuah bidang ahli yang sejajar dengan profesi khusus lainnya, pertimbangan nilai seorang auditor akan disesuaikan dengan profesi khusus lainnya.

Dari urain diatas penentuan *fee* audit terdiri dari Karakteristik Keuangan, Lingkungan, dan Kegiatan Eksternal Auditor. Selain itu indikator dari Besaran *fee* audit bergantung resiko penugasan, kompleksitas, tingkat keahlian dan biaya dari Kantor Akuntan Publik.

#### **2.1.2.5 Metode Pengukuran *Fee* Audit**

Menurut Sukrisno Agoes (2012:18) Audit *Fee* adalah:

“Besaran biaya yang tergantung antara lain pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.”

Data mengenai *Fee* Audit diprosikan oleh akun *professional fee* yang terdapat dalam laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. Pengungkapan data tentang *fee* audit masih bersifat *voluntary disclosure* sehingga belum banyak perusahaan mencantumkan data professional fee di dalam annual reportnya. pada bagian tata kelola perusahaan.

*Fee* audit diukur menggunakan logaritma natural dari data atas akun *professional fee* karena pengungkapan data tentang *fee* audit masih bersifat *voluntary disclosure* sehingga belum banyak perusahaan mencantumkan data

professional fee di dalam annual reportnya. pada bagian tata kelola perusahaan. *Fee* audit kemudian di ukur menggunakan logaritma natural dari total *fee* audit.

$$Fee \text{ audit} = \text{logaritma natural professional } fee.$$

### 2.1.3 Kompleksitas Perusahaan

#### 2.1.3.1 Pengertian Kompleksitas Perusahaan

Menurut Ahmad dalam Angruningrum dan Wirakusuma (2013: 255)

“kompleksitas perusahaan adalah jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan memiliki unit operasi yang lebih banyak yang harus diperiksa dalam setiap transaksi dan catatan yang menyertainya, sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pekerjaan auditnya”.

Menurut Rukmana,dkk (2017) Kompleksitas perusahaan merupakan :

“Hal yang terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kerumitan tersebut dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, jumlah anak dan cabang perusahaan, maupun adanya operasi bisnis di luar negeri”

Menurut Siuko dalam Lestari ( 2015)

“kompleksitas Perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dapat meningkatkan tantangan pada audit dan akuntansi. Tingkat kompleksitas operasi perusahaan yang bergantung pada lokasi dan jumlah unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya lebih cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompleksitas perusahaan merupakan kerumitan transaksi yang terjadi di perusahaan.

Kompleksitas ini dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, banyaknya anak perusahaan, cabang maupun adanya operasi bisnis di luar negeri.

### **2.1.3.2 Jenis-jenis Penggabungan Perusahaan**

Menurut Suwardjono (2014), kompleksitas perusahaan berkaitan dengan penggabungan usaha yang dilakukan oleh dua perusahaan. Perusahaan merupakan wadah untuk menggapai tujuan bersama para pendirinya dengan melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan kegiatan ekonomi dan sosial dalam suatu masyarakat.

Menurut Sudana (2015), disversifikasi adalah salah satu alasan perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha. Disversifikasi dicapai melalui penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam industri berbeda. Dengan adanya penggabungan usaha, ketika nantinya ada salah satu perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan lain masih memperoleh laba sebagaimana mestinya. Sehingga secara keseluruhan laba yang diperoleh setelah penggabungan menjadi lebih stabil dan risikonya menjadi lebih kecil.

Penggabungan usaha dengan perusahaan yang sudah ada dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Merger

Merger adalah penggabungan dua usaha yang memiliki ukuran berbeda. Perusahaan yang lebih kecil akan melebur ke perusahaan yang lebih besar.

2. Konsolidasi

Konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya sama menjadi satu perusahaan yang baru.

### 3. Akuisisi

Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan dimana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang ingin diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi akan berpindah kepada perusahaan akuisitor. Namun, kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri.

#### **2.1.3.3 Metode Pengukuran Kompleksitas Perusahaan**

Kompleksitas perusahaan berkaitan dengan kerumitan transaksi yang terjadi di perusahaan yang berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, banyaknya anak perusahaan, cabang maupun adanya operasi bisnis di luar negeri.

Auditor akan membutuhkan banyak waktu dan keahlian untuk melakukan audit. Semakin besar kompleksitas audit, semakin besar pula audit fee yang dikenakan auditor kepada perusahaan atau klien yang akan diaudit.

“penelitian ini menggunakan anak perusahaan sebagai indikator kompleksitas, mengingat kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit” (Widiasari, 2009:129).

Kompleksitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan klien, menggunakan interval. Jika perusahaan memiliki jumlah anak perusahaan sebanyak 29-35 maka diberi nilai (5), jika anak perusahaan sebanyak 22-28 maka diberi nilai (4), jika anak perusahaan berjumlah 15-21 maka diberi nilai (3), jika anak perusahaan berjumlah 8-14 maka diberi nilai (2), jika anak perusahaan berjumlah 1-7 maka diberi nilai (1).

## **2.1.4 Ukuran Perusahaan**

### **2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan**

Machfoedz dalam Jesslyn(2018),

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi ke dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*Medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Simunic dalam Ulfasari dan Marsono (2014),

“perusahaan yang memiliki asset lebih besar akan mempunyai kemampuan di atas perusahaan yang kecil dalam memperoleh modal. Dengan begitu, hal ini berbanding lurus dengan kemampuan membayar fee audit yang lebih tinggi.”

Menurut Brigham & Houston (2010:4);

“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.”

Menurut Hilmi dan Ali (2008) pengertian ukuran perusahaan adalah:

“Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi, besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat didasarkan pada total nilai

aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar aktiva suatu perusahaan maka akan semakin besar pula modal yang ditanam. Semakin besar total penjualan suatu perusahaan maka akan semakin banyak juga perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat”

Berdasarkan definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya sebuah perusahaan yang di tunjukan oleh total aset, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aset.

#### **2.1.4.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

Menurut UU No.20 Tahun 2008 Ukuran Perusahaan dibagi kedalam 4

(empat) kategori yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan Rp.300.000.000,-
2. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Perusahaan dengan usaha ukuran kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,-.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.500.000.000,- sampai Rp.10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,-.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp.50.000.000.000,-

**Tabel 2.1**

**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

**2.1.4.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan**

Menurut Kusumawardhani (2012:24):

“Metode ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai asset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset dan total penjualan (*netsales*) yang dimiliki perusahaan”.

Menurut Julia Halim, Carmel Meiden dan Rodulf Lumban Tobing (2005) dalam Jatnika (2013:40):

“Bahwa ukuran perusahaan diukur dari *market capitalization* yaitu jumlah lembar saham beredar akhir tahun dikalikan dengan harga saham penutupan akhir bulan kemudian hasilnya di-log agar nilai tidak terlalu besar untuk masuk ke modal perusahaan”.

Menurut Syafri (2007:23) pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total assets) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”

Menurut Machfoedz dalam Jesslyn(2018) menyatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain).”

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log Total Aktiva}$$

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log total aktiva karena untuk memudahkan penelitian disebabkan oleh jumlah total aktiva perusahaan mencapai puluhan trilyun sedangkan variabel dependen maupun independen menggunakan skala pengukuran rasio oleh sebab itu, ukuran perusahaan diukur menggunakan log total aktiva (Ln\_Total Aktiva).

## **2.1.5 Ukuran Kantor Akuntan Publik**

### **2.1.5.1 Pengertian Kantor Akuntan Publik**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang

didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa organisasi yang dibentuk untuk memberikan jasa akuntansi professional termasuk audit, pada umumnya didirikan sebagai kepemilikan pribadi atau persekutuan.

#### **2.1.5.2 Pengertian Ukuran Kantor Akuntan Publik**

Menurut Devianto dalam Firyana (2015) :

“Ukuran KAP merupakan pembedaan jumlah klien dan jumlah anggota yang dimiliki oleh suatu kantor akuntan publik. Ukuran KAP dapat dilihat dari berbagai hal yang terkait dengan KAP, seperti jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP tersebut .”

Sedangkan menurut Arsih (2015):

“Ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik, semakin besar Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya.”

Menurut Andra (2012) dalam Firyana (2014):

“Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga professional di atas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak

mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan.

### **2.1.5.3 Katergori Ukuran Kantor Akuntan Publik**

Menurut Arens et al. (2012:32), kategori ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) secara internasional adalah sebagai berikut:

1. Kantor Internasional Empat Besar. Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “Big Four”. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor “Big Four” mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.
2. Kantor Nasional. Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “Big Four” dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional .
3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar. Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya

memiliki satu kantor dan terutama melayani klien–klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.

4. Kantor Lokal Kecil. Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.”

Sedangkan menurut Messier et al. (2014:41):

“Kantor akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor yang terbesar adalah kantor akuntan publik “Big 4”: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.”

Pada Buku Direktori IAI (2011), IAI mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu:

1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing.
2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing.

Dari ketiga pengkategorian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kategori ukuran KAP di Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP bertaraf internasional, maka ukuran KAP dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP Internasional big four, yaitu KAP asing big four yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing big four, yakni Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.
2. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional non big four, yaitu KAP asing non big four yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing non big four, yakni Kreston International, PKF International, dan sebagainya.
3. KAP Nasional, yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri, terletak/berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka cabang di kota-kota besar utama di Indonesia. 25
4. KAP Regional dan Lokal Besar, yaitu KAP di Indonesia yang berdiri sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah. Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP regional dan lokal besar, terutama yang terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan wilayahnya, dan beberapa dari yang lainnya memiliki beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar di Indonesia.
5. KAP Lokal Kecil, yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membuka cabang, dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesional.

#### **2.1.5.4 Metode Pengukuran Ukuran Kantor Akuntan Publik**

Berdasarkan kategori kantor akuntan publik maka ukuran kantor publik di Indonesia jika dihubungkan dengan KAP yang bertaraf internasional yang membuka cabang atau KAP di Indonesia yang berafiliasi dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. KAP nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional Big four
2. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional non big four
3. KAP Nasional.
4. KAP Regional dan Lokal Besar.
5. KAP Lokal Kecil.

Pada penelitian ini ukuran Kantor Akuntan Publik diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan nilai 1-5. Jika perusahaan menggunakan KAP nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional Big four diberi nilai 5., jika perusahaan menggunakan KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional non big four diberi nilai 4, jika perusahaan kantor akuntan publik KAP Nasional diberi nilai 3, jika perusahaan menggunakan kantor akuntan publik KAP Regional dan Lokal Besar diberi nilai 2, jika perusahaan menggunakan kantor akuntan publik KAP Lokal Kecil diberi nilai 1.

#### **2.1.6 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fee audit dengan menggunakan beberapa Variabel. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Jesslyn

Cristansy dan Aloysia Yanti Ardianti (2018) dengan judul pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bei. Penelitian ini menggunakan variabel independen kompleksitas Perusahaan, ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik. Sedangkan variabel dependennya yaitu *fee* audit. Hasil dari penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif pada *fee* audit.

No	Peneliti	Judul peneliti	Variabel	Hasil penelitian
1.	Raymond Immanuel dan Etna Nur Afri Yuyetta (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan audit fees(studi empirik pada perusahaan Manufaktur)	Tipe kepemilikan perusahaan, ukuran perusahaan, anak perusahaan, ukuran KAP, manajemen Laba.	Tipe kepemilikan perusahaan berpengaruh positif terhadap audit <i>fees</i> , Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit <i>fees</i> , Anak perusahaan berpengaruh positif terhadap audit <i>fees</i> , Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap audit <i>fees</i> , Manajemen laba berpengaruh positif terhadap audit <i>fees</i> .
2.	Andri Kusumajaya (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>fee</i> Audit Eksternal pada Perusahaan	Dewan komisaris, Komite Audit, Fungsi Internal, Ukuran Perusahaan klien	Dewan Komaris berpengaruh Negatif terhadap <i>fee</i>

		Manufaktur		audit eksternal, komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>fee</i> Audit external, Fungsi internal Audit berpengaruh negatif terhadap <i>fee</i> audit eksternal, Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit eksternal, Kompleksitas Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Fee</i> audit eksternal.
3.	Jesslyn Cristianty dan Aloysia Yanti Ardianti (2018)	Pengaruh Kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap <i>fee</i> audit pada perusahaan manufaktur	Kompleksitas Perusahaan, Ukuran perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik	Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit, ukuran Kantor akuntan Publik berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit.
4.	Fischa Adhitya Fatimah dan Wahyu Pramesti (2018)	Pengaruh <i>firm size</i> , <i>subsidiaries</i> , dan <i>auditor size</i> terhadap <i>fee</i> audit	<i>Firm size</i> , <i>subsidiaries</i> , <i>Auditor size</i>	<i>Firm size</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> , <i>subsidiaries</i>

				akan berpengaruh positif terhadap audit <i>fee</i> , auditor size berpengaruh terhadap audit <i>fee</i> .
5.	Evlin Adelina Sinaga dan Sisty Rachmawati (2018)	Besaran <i>fee</i> audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI.	<i>Status of audit firm</i> , Loyalitas, External Audit Report Lag, Tipe Industri, Anak Perusahaan, Tipe Kepemilikan Perusahaan.	Status kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit, Loyalitas Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Fee</i> audit, External Audit Report Lag berpengaruh positif terhadap <i>Fee</i> audit, Tipe Industri berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> Audit. Anak Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> Audit, Kepemilikan perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Fee</i> audit.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Fee* audit pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI

Kompleksitas perusahaan berkaitan dengan kerumitan transaksi yang terjadi di perusahaan. Menurut Ahmad dalam Angruningrum dan Wirakusuma (2013: 255) kompleksitas perusahaan adalah “jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan memiliki unit operasi yang lebih banyak yang harus diperiksa dalam setiap transaksi dan catatan yang menyertainya, sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pekerjaan auditnya”.

Menurut Rukmana,dkk (2017) Kompleksitas perusahaan merupakan “Hal yang terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kerumitan tersebut dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, jumlah anak dan cabang perusahaan, maupun adanya operasi bisnis di luar negeri”. Kompleksitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anak dan cabang perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan klien.

Hasil dari Penelitian yang dilakukan Jesslyn Cristanty dan Aloysia Yanti (2018) mengemukakan Bahwa kompleksitas Perusahaan berpengaruh Positif terhadap *fee* Audit. Karena Semakin besar perusahaan, semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki. Keberadaan unit operasi perusahaan akan meningkatkan kompleksitas audit yang dilakukan oleh auditor. Dengan begitu akan meningkatkan *fee* audit yang harus dibayarkan pada auditor karena auditor memerlukan waktu yang lebih panjang dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.

### **2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Fee Audit* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI**

Ukuran perusahaan adalah gambaran besar kecilnya skala operasi suatu perusahaan. Machfoedz dalam Jesslyn(2018), Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi ke dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*Medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total asset perusahaan.

Simunic dalam Ulfasari dan Marsono (2014), berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki asset lebih besar akan mempunyai kemampuan di atas perusahaan yang kecil dalam memperoleh modal. Dengan begitu, hal ini berbanding lurus dengan kemampuan membayar fee audit yang lebih tinggi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Jesslyn Cristanty dan Aloysia Yanti(2018) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh Positif Terhadap *Fee Audit*. Karena Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar dan luasnya proses audit yang akan dijalankan oleh auditor. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasarnya akan mempengaruhi besarnya *fee* audit yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar cenderung memiliki jumlah transaksi yang besar pula sehingga auditor yang melakukan pekerjaan audit pada perusahaan besar membutuhkan waktu dan

jumlah tim audit yang lebih banyak dibandingkan dengan mengaudit perusahaan kecil. dengan begitu *fee* audit yang harus dibayarkan juga semakin tinggi.

### **2.2.3 Pengaruh Ukuran kantor Akuntan Publik terhadap fee audit pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI**

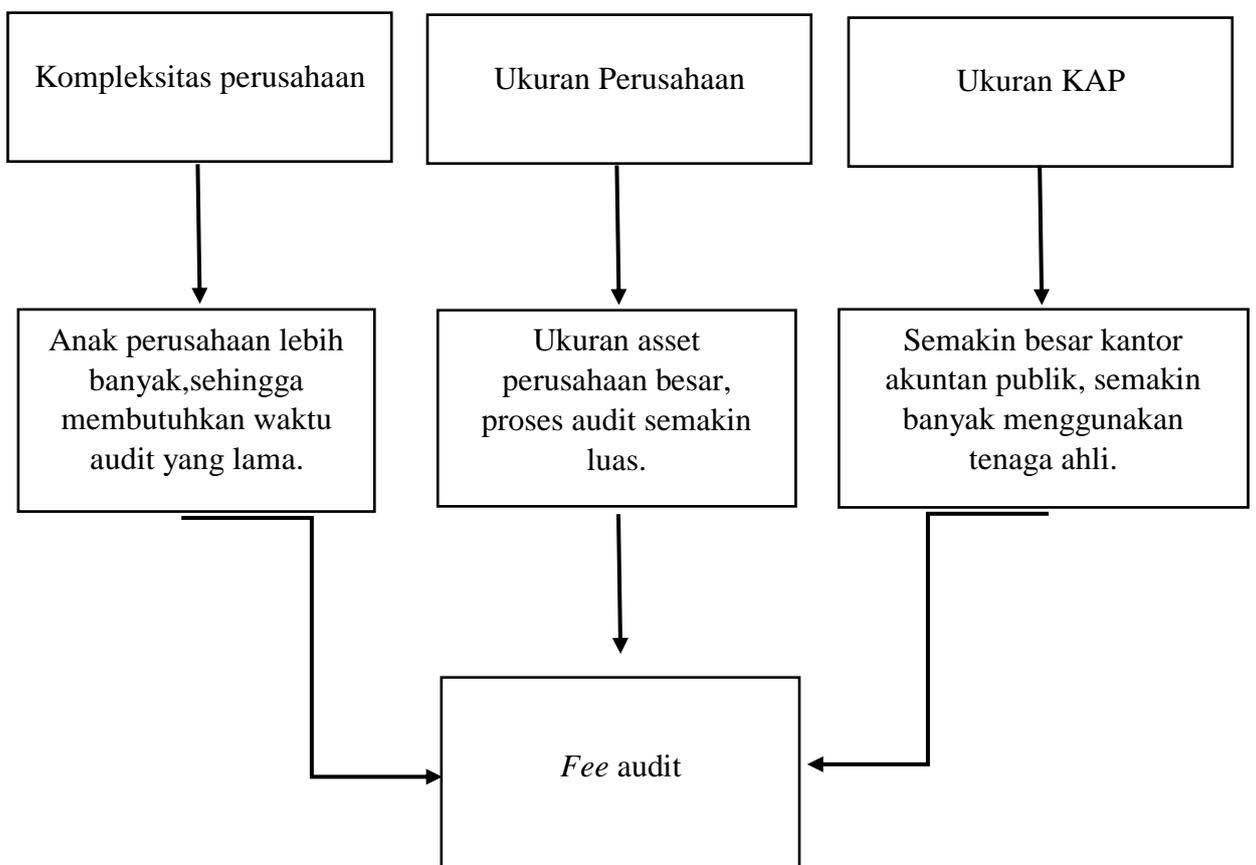
Menurut Andra dalam Firyana (2014), Ukuran KAP adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang.

Menurut Arsih (2015): “Ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik, semakin besar Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya.”

Hasil dari penelitian yang dilakukan Jesslyn Cristanty dan Aloysia Yanti(2018) menyatakan Bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh Positif Terhadap *Fee* Audit. Karena semakin besar ukuran kantor akuntan publik semakin tinggi *fee* audit yang harus dibayarkan oleh klien. Hal ini dikarenakan

kantor akuntan publik yang besar banyak menggunakan tenaga professional yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

#### 2.2.4 Gambar Skema Kerangka Pemikiran



### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:93) Hipotesis merupakan : “Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.” Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena belum didasarkan pada fakta-fakta empiris.

Dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, dapat ditemukan hipotesis sebagai berikut:

H1: kompleksitas perusahaan berpengaruh *signifikan* terhadap *fee* audit

H2: ukuran perusahaan berpengaruh *signifikan* terhadap *fee* audit

H3: ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh *signifikan* terhadap *fee* audit.